

DAFTAR REFRENSI

A. Buku

- Abdulkadir, M. (2018). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ananda. (2018). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kartika.
- Anwar, M. (2019). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP Buku II)*. PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2021). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Arief, B. N. (2020). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana Prenada Media Group.
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2020). *Pelajaran hukum pidana*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2020). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harjono. (2020). *Konstitusi sebagai rumah bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Kanter, E. Y. (2020). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Alumni.
- Kristiyanti, C. T. S. (2020). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Maskun. (2019). *Kejahatan siber (Cyber crime): Suatu pengantar*. Kencana.
- Miru, A., & Yodo, S. (2019). *Hukum perlindungan konsumen*. PT RajaGrafindo Persada.
- Moeljatno. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

- Prodjodikoro, W. (2019). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2016). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2020). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Romli, A. S. M. (2012). *Jurnalistik online: Panduan praktis mengelola media online*. Nuansa Cendekia.
- Ruba'i, M., dkk. (2020). *Buku ajar hukum pidana*. Banyumedia Publishing.
- Sasongko, W. (2019). *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen*. Universitas Lampung.
- Shidarta. (2016). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. PT Grasindo.
- Soekanto, S. (2020). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sugandhi, R. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wijayanti, A. (2018). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Aoelia, L., & Rachmat, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui media sosial.
- Arif, M. C. (2020). *Dasar-dasar kajian budaya dan media*. Surabaya: UINSA Press.
- Budiastanti, D. E. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui internet. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1).
- Ingkeatubun, Y. F. A., & Rosando, A. F. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui sosial media di Kabupaten Kepulauan Aru. *Harmonization: Jurnal Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, dan Ilmu Ekonomi*, 2(1), 45–52.
<https://doi.org/10.59066/harmonization.v2i1.409>

- Maharani, F. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online investasi ilegal menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif hukum pidana. *Lex Privatum*, 13(4).
- Marzuqi, M. A. A., Subekti, & Hamdani, F. (2025). Perlindungan hukum bagi korban penipuan giveaway di media sosial. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1). <https://doi.org/10.25139/lex.v7i1.11513>
- Paminto, S. R., Amalia, M., Mulyana, A., & Auliya, A. H. (2024). Peran hukum dalam melindungi korban penipuan media sosial perspektif sosiologi. *Journal Customary Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i1.3335>
- Puspitasari, R. J., & Sulisty, A.-Q. P. (2024). Perlindungan hukum bagi korban penipuan online shop dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.2088>
- Romli, A. S. M. (2012). *Jurnalistik online: Panduan praktis mengelola media online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Saputra, M. I., Kuswanto, I., Khalimy, A., & Dzikirulla, M. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online dalam transaksi e-commerce melalui sosial media Facebook (Studi kasus: Penipuan yang dialami Yisa). [Nama jurnal tidak tersedia], 6(1), 132–135.
- Salsabila, V. D., Putera, A., & Jannah, M. (2026). Tinjauan yuridis tindak pidana penipuan jual beli barang melalui online. [Nama jurnal tidak tersedia], 1(2).
- Sari, T. P., Aprita, S., & Kifli, S. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran berita bohong melalui media sosial Facebook. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), 60–71. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i1.3207>
- Setiyawan, R., & Prakasa, S. U. W. (2021). Indonesian online shopping practices in the COVID-19 pandemic era: A study of culture and cyber security law. *Jurnal Hukum Novelty*, 12(1), 29–42. <https://doi.org/10.26555/novelty.v12i01.a16944>
- Sumardiana. (2018). Penggunaan internet cerdas sebagai upaya penanggulangan tindak pidana hate speech pada remaja (didasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 1(1).

Talita, R. (2026). Perlindungan hukum terhadap korban penipuan online melalui media sosial menurut perspektif hukum pidana Islam (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resort Banda Aceh). *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, 2(1).

Wiguna, I. M. A., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen online marketplace akibat dampak COVID-19. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 135–141.

Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli online. (2022). *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1198>

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan e-commerce. (2024). *ACADEMOS: Jurnal Hukum dan Tatahan Sosial*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat.